

**Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
di Kota Solok**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)

Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang



DISUSUN OLEH :

ADELIA KURNIATI ILDA

NIM/BP : 21042233/21

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin, 11 Agustus 2025 Pukul 11.00 s/d 13.30 WIB

Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kota Solok

Nama : Adelia Kurniati Ilda
TM/NIM : 2021 / 21042233
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

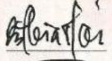
Padang, 11 September 2025

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Yuliarti, S.E., M.E
Anggota: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA
Anggota: Artha Dini Akmal, S.Ap., MPA

1. 
2. 
3. 



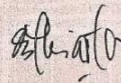
Mengesahkan,
Dekan FIS UNP
Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D.
NIP. 19660411 199003 1 002

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Di Kota Solok
Nama : Adelia Kurniati Ilda
TM/NIM : 2021 / 21042233
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 September 2025

Disetujui oleh,
Pembimbing



Yuliarti, S.E., M.E.

NIP. 198907262019032012

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Adelia Kurniati Ilda
NIM : 21042233
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 02 Januari 2003
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul **“Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kota Solok”**. Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 Agustus 2025



Kurniati Ilda
21042233

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masih tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Solok, meskipun program bantuan perbaikan RTLH telah dilaksanakan sejak 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program RTLH oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta menggunakan teknik triangulasi untuk keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RTLH memberikan dampak positif terhadap kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti kurangnya partisipasi swadaya dari masyarakat, keterlambatan distribusi bahan bangunan, serta permasalahan administratif seperti bukti kepemilikan tanah. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun program telah berjalan cukup efektif dan efisien, diperlukan peningkatan pengawasan, penyempurnaan sistem pendataan, dan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran agar program RTLH dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Program RTLH; Kebijakan Perumahan; Evaluasi Implementasi; Masyarakat;

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kota Solok”**. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan menuju kebaikan bagi manusia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., P.hD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, serta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyenti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

4. Ibu Yuliarti S.E, M.E selaku dosen Penasehat Akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing yang telah telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA dan Ibu Artha Dini Akmal, S.Ap., MPA selaku Dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, staff pengajar dan karyawan/karyawati Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Lili Andriani, S.T.,M.T selaku Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Ibu Marini Rosa, S.T., MT selaku Analis Infrastruktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
9. Ibu Djasnimar, Ibu Dasmalina, Ibu Eni, Ibu Dewi, Ibu Eliza selaku masyarakat penerima bantuan program RTLH yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.

10. Bapak Iip Permana, S.T.,M.T selaku Pakar yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Bapak Ilyas dan Mama Marsida, kedua orang tua hebat yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tak ternilai harganya kepada penulis, terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan serta terima kasih untuk setiap perjuangan dan doa tulusnya yang selalu mengiringi perjalanan pendidikan penulis, sehingga penulis sampai ke jenjang Sarjana.. Hiduplah lebih lama dan temani penulis melanjutkan perjalanan dan pencapaian selanjutnya.
12. Kepada saudara kandung penulis, Vina Yuniarti, S.E.,Vita Putri Dewi, S.Pd, Annisa Amalina Ilda, A.Md yang selalu memberikan semangat, masukan dan juga motivasi serta kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada Hanna Azhara dan Muhammad Rayhan Fadhilah selaku sahabat yang selalu menerima keluhan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu siap penulis hubungi kapanpun.
14. Sahabat baik penulis dibangku perkuliahan (Nurul, Tarifa, Lania, Mutia) yang menemani dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan
15. Seluruh keluarga besar “Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara” Angkatan 2021 dan Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu

Administrasi Negara yang telah menjadi teman baik dan tempat saling bertukar pikiran selama 4 tahun ini

16. Dan yang terakhir, terima kasih untuk Adelia Kurniati Ilda, diri saya sendiri karena mampu berusaha, berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Hebat bisa bertahan menghadapi situasi yang tidak mudah hingga sejauh ini, terima kasih untuk tidak pernah menyerah walaupun sering tumbang, perjalanan masih panjang, semoga selalu kuat dan mampu menebarkan hal positif dan memberikan manfaat bagi sekitar.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis,

Padang, 01 Agustus 2025



Adelia Kurniati Ilda
21042233

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teoritis.....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan	18
C. Kerangka Konseptual	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Fokus Penelitian.....	22
C. Lokasi Penelitian.....	22
D. Informan Penelitian	23
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	23
F. Uji Keabsahan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Temuan Umum.....	28
B. Temuan Khusus.....	39
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	71

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Rekap Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah dilaksanakan dari tahun 2019 s/d 2023	4
Tabel 3.1 Informan penelitian.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	21
Gambar 4.1 Dokumentasi Pertemuan di Rumah Susun.....	31
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok.....	32
Gambar 4.3 Sosialisasi Program RTLH Kota Solok.....	41
Gambar 4.4 Tahapan kegiatan program RTLH	43
Gambar 4.5 Surat Teguran Dari Dinas Perkim untuk Toko Bnagunan	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting selain sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan adalah memiliki tempat tinggal yang layak, seperti rumah. Kebutuhan akan sandang dan pangan bisa relatif lebih mudah dipenuhi, namun kebutuhan akan rumah yang layak berbeda. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Namun tidak semua manusia mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut (Kamilia Nada, 2019).

Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar setiap individu yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat berkembangnya kehidupan keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah yang layak huni. Terdapat 32 juta dari total 75 juta rumah tangga di Indonesia hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak (Arini, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa masalah perumahan layak masih menjadi tantangan besar di negara kita. Menurut data BPS pada tahun 2024 di Sumatera Barat terdapat 62,29 presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak, hal ini berarti masih terdapat 37,71 persen rumah yang dikatakan tidak layak huni, salah satunya di Kota Solok masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi yang tidak memenuhi standar kelayakan. Seperti yang dilaporkan oleh Antara Sumbar (2024), saat ini jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Solok kurang lebih sebanyak 1.350 unit. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah

yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2018.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang ditujukan untuk rumah tangga miskin (RTM) dan merupakan bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. Program ini melibatkan perbaikan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, dengan penekanan pada peningkatan atap, lantai, dinding, dan fasilitas MCK (Hanum, 2023).

Menurut Taufik dan Sriharyati (2019), program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan. Tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat. Salah satu daerah yang melaksanakan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Kota Solok. Program RTLH Kota Solok di atur dalam peraturan Walikota Solok No. 30 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan. Pemerintah kota solok melaksanakan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikarenakan program tersebut menjadi salah satu program yang dijadikan sebagai prioritas utama oleh Pemerintah Kota Solok dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi masalah kemiskinan, serta tercapainya visi pembangunan Kota Solok yang mendukung Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu terwujudnya Kota Tanpa Kawasan Kumuh (*Data Laporan DPRKPP, 2020*).

Tahapan yang dilakukan dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Dana alokasi khusus (1) sosialisasi RTLH di tingkat kelurahan (2) melakukan survey yang terdiri dari unsur kelurahan, RT/RW/Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan unsur Dinas Perkim Kota Solok, (3) melakukan pengolahan data dan perangkingan berdasarkan hasil survey, (4) melakukan rapat tim teknis terkait hasil dari pengolahan data, (5) rapat untuk melengkapi syarat-syarat administrasi bagi calon penerima bantuan yang lolos dari hasil rapat tim teknis, (6) berdasarkan hasil survey dan kelengkapan administrasi maka dibuatkan SK penerima bantuan RTLH dana DAK oleh Walikota, (7) rapat pembentukan kelompok dan pemilihan ketua kelompok serta survey toko bangunan oleh ketua kelompok, (8) pembukaan buku rekening oleh pihak bank didampingi oleh TFL, (9) rapat menentukan toko bangunan oleh calon penerima bantuan dan penyusunan RAB yang didampingi oleh TFL, (10) penandatanganan kontrak antar ketua calon penerima bantuan dengan toko bangunan, (11) pencairan dana tahap I (50%) toko bangunan mengantarkan bahan bangunan berdasarkan daftar rencana pembelian bahan bangunan tahap 1 serta menyusun laporan penggunaan dana (LPD) tahap 1, (12) pencairan dana tahap II (50%) pencairan bisa dilakukan bila progres fisik minimal 30% dan toko bangunan mengantarkan bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana Pembelian Bangunan tahap 2, (13) melakukan penyusunan laporan penggunaan dan tahap 2 serta menyempurnakan hasil laporan akhir (Administrasi berupa proposal LPD 1 dan LPD 2).

Data pada tabel berikut ini menjelaskan jumlah rumah yang telah mendapatkan bantuan dari program RTLH sebanyak 1.195 unit. Tim fasilitator Disperkim, Beni Novrianto menyebutkan masih banyak terdapat rumah yang belum permanen dan masuk kategori rumah tidak layak huni.

Tabel 1.1 Data Rekap Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah dilaksanakan dari tahun 2019 s/d 2023

NO.	Kelurahan	kecamatan	Jumlah Unit per Tahun Pelaksanaan				Jumlah Total per Kelurahan
			Sumber Dana				
			BSPS	APBD			
			2019	2019	2022	2023	
1	Nan Balimo	Tanjung Harapan	27	0	10	17	187
2	Tanah Garam	Lubuk Sikarah	190	4	15	25	347
3	Kampung Jawa	Tanjung Harapan	74	0	9	23	178
4	Koto Panjang	Lubuk Sikarah	0	0	3	1	16
5	VI Koto	Lubuk Sikarah	42	0	3	5	66
6	Sinapa Piliang	Lubuk Sikarah	0	0	0	5	19
7	Kampai Kubu Karambi	Lubuk Sikarah	21	0	6	12	82
8	IX Korong	Lubuk Sikarah	0	0	1	3	21
9	Tanjung Paku	Tanjung Harapan	38	0	7	6	86
10	Aro IX Korong	Lubuk Sikarah	0	0	1	0	41
11	Simpang Rumbio	Lubuk Sikarah	28	0	3	6	52
12	Laing	Tanjung Harapan	0	0	2	2	59
13	Pasar Pandan Air Mati	Tanjung Harapan	0	0	1	0	41
	Jumlah Total per Tahun		420	4	62	105	1195

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas, data jumlah unit program perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan sumber dana dan tahun pelaksanaan. Program ini didanai oleh beberapa sumber, yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Dari data yang ada, program ini telah berjalan sejak tahun 2017 hingga 2023, dengan jumlah unit yang bervariasi tiap tahunnya. Pendanaan APBD digunakan pada tahun 2019, 2022, dan 2023. Selain itu, terdapat juga pendanaan dari BSPS pada tahun 2019. Secara keseluruhan, jumlah unit perbaikan rumah mencapai 1.195 unit. Jika dilihat per tahun, jumlah tercatat pada tahun 2019 dengan 4 unit dari APBD, dan 420 unit dari BSPS, sehingga totalnya mencapai 586 unit. Sementara itu, tahun dengan jumlah unit terendah adalah 2022, dengan hanya 62 unit yang didanai oleh APBD. BSPS mendanai kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok sebagai bagian dari upaya pemerintah

pusat untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas permukiman.

Terdapat 3 jenis dalam rehabilitasi dalam program RTLH diantaranya bangun baru dengan biaya sebesar Rp 60.000.000 ,rehabilitasi sedang sebesar Rp 35.000.000 dan rehabilitasi ringan sebesar Rp 20.000.000 . Jumlah ini bisa berubah tergantung dengan perubahan harga satuan bangunan. Menurut salah satu penerima bantuan dari program RTLH Kota Solok, Ibu Djasnimar dalam hasil wawancara dengan penulis menyampaikan bahwa,

“Dikarenakan dengan adanya program RTLH ini saya bisa mendapatkan hunian yang layak dan nyaman. Serta program ini sangatlah membantu untuk masyarakat yang kurang mampu...”

Dari hasil observasi yang dilakukan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok tidak sepenuhnya berjalan lancar. Berbagai kendala menjadi faktor penghambat dalam merealisasikan program ini kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris bagian RTLH di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok menerangkan:

“....Untuk kendala dilapangan banyak kita kemui, yang pertama masyarakat yang sudah menerima bantuan ini tidak membongkar rumah lamanya, itu membuat jumlah rumah tidak layak huni tidak berkurang lalu nanti diusulkan lagi oleh anggota keluarga lainnya. Kedua, dilapangan itu masyarakat mengaku tidak ada swadaya. Sementara di awal mereka mengaku bahwa ada swadaya. lalu terkadang keterlambatan pengantaran bahan bangunan dari toko bangunan dan kadang juga masalah dari tukang. (observasi dilakukan pada tanggal 20 November 2024)”.

Dari hasil wawancara tersebut digambarkan tentang kendala yang terjadi di lapangan. Program RTLH bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah warga yang tidak

layak huni agar memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial sesuai peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang menghambat efektivitas program tersebut. Salah satu kendala yang sering muncul adalah masyarakat penerima bantuan tidak menghancurkan rumah lama yang sudah tidak layak setelah rumah baru dibangun. Hal ini menyebabkan rumah lama tetap berdiri dan kemudian diajukan kembali oleh anggota keluarga lain untuk mendapatkan bantuan yang sama, sehingga mengurangi efisiensi program. Kondisi ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan koordinasi dari pihak terkait. Pengawasan yang lemah memungkinkan rumah lama tetap dipertahankan dan tidak dibongkar sesuai ketentuan program yang mengharuskan rumah tidak layak huni dihancurkan sebagai syarat mendapatkan bantuan pembangunan rumah baru.

Selain itu dalam pelaksanaannya sering ditemukan kendala signifikan berupa keterlambatan pengiriman bahan bangunan dari toko atau penyedia material ke lokasi pembangunan. Keterlambatan ini menyebabkan proses pembangunan menjadi terhambat. Dampak lain dari keterlambatan ini adalah penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan penyelesaian pembangunan rumah tidak sesuai target waktu yang ditetapkan. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas program RTLH dalam mengentaskan rumah tidak layak huni secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Faktor penghambat lainnya juga berasal dari masyarakat. Yaitu kurangnya swadaya dari masyarakat. Keswadayaan ini berupa kontribusi dana, tenaga, maupun partisipasi aktif dalam proses pembangunan rumah. Banyak penerima bantuan mengalami kesulitan menyediakan dana swadaya yang menjadi syarat pelaksanaan program, sehingga program tidak berjalan optimal. Keterbatasan swadaya ini disebabkan oleh

kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berasal dari kelompok miskin atau sangat miskin, yang tidak mampu menambah biaya di luar bantuan yang diberikan.

Salah satu faktor penghambat dari aspek sosial yaitu terkait permasalahan kepemilikan tanah masyarakat. Disebutkan dalam Peraturan Walikota Solok No.30 Tahun 2022 bahwasanya salah satu kriteria penerima bantuan RTLH Kota Solok yaitu memiliki dan menguasai tanah dibuktikan dengan sertifikat, atau surat keterangan menguasai tanah (hibah) dari pemilik sertifikat. Oleh karena itu bagi masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tidak bisa menjadi penerima bantuan dari program RTLH.

Penelitian serupa tentang Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga pernah diteliti oleh Bintari Laras Anggraini (2021), yaitu dengan studi kasus di kabupaten Tuban. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan pokok masyarakat Kabupaten Tuban ialah kurangnya kesempatan memperoleh perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terbatasnya ruang untuk berlindung. Oleh karena itu sektor perumahan dan permukiman sampai saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah baik Pusat atau Daerah.

Evaluasi program RTLH secara umum adalah proses menilai sejauh mana program perbaikan rumah tidak layak huni telah mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti peningkatan kualitas hunian, kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan program ke depan. Evaluasi program RTLH di Kota Solok mencakup beberapa aspek utama yang menentukan keberhasilan program ini. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketepatan sasaran penerima manfaat.

Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan juga menjadi faktor penting dalam evaluasi. Program RTLH di Kota Solok sebagian besar dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh masyarakat setempat, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan rumah. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa bantuan material dan pendampingan teknis belum sepenuhnya optimal, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hasil pembangunan.

Sebagai upaya peningkatan keberhasilan program, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti perbaikan sistem pendataan penerima bantuan, peningkatan transparansi dalam alokasi anggaran, serta penguatan pendampingan teknis bagi penerima manfaat. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan program RTLH di Kota Solok dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Dampak program RTLH terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Peningkatan kualitas hunian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.2 Contoh RTLH di Kota Solok

A. Sebelum



B. Sesudah



Sumber : TopSumbar,2023

Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan implementasi program RTLH di masa mendatang. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program RTLH, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dalam menciptakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat miskin. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana evaluasi terhadap program yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan judul **“Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari program RTLH tidak membongkar rumah lamanya yang kemudian diajukan Kembali oleh anggota keluarga lainnya
2. Kurangnya swadaya dari masyarakat
3. Terkadang terjadi keterlambatan pengantaran bahan oleh toko bangunan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar pengakjian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi program RTLH di Kota Solok.

D. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok?.
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok?.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur akademik terkait evaluasi program RTLH serta diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam pengembangan pengetahuan tentang Kebijakan Publik.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam perbaikan rumah tidak layak huni, serta meningkatkan mekanisme implementasi program.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam menentukan strategi perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih optimal dalam penyelenggaraan program RTLH.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Solok dapat diambil kesimpulan pelaksanaan Program RTLH di Kota Solok telah berjalan dengan baik, terstruktur, dan efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diterapkan dengan mekanisme yang jelas mulai dari survei, perencanaan teknis, verifikasi administrasi, hingga rehabilitasi rumah, dengan peran aktif Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai penghubung antara dinas dan masyarakat. Efektivitas program terlihat dari dampak positif signifikan terhadap penerima manfaat yang memperoleh rumah layak huni yang sehat, aman, dan nyaman, serta meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi keluarga. Sinergi antara pemerintah, fasilitator, dan masyarakat turut mendukung transparansi dan keterbukaan proses pelaksanaan.

Dari sisi efisiensi, program mengelola sumber daya secara optimal, baik alokasi anggaran yang diawasi dengan ketat, waktu pelaksanaan yang terjaga stabilitasnya, serta pemanfaatan tenaga kerja lokal melalui sistem gotong royong yang mempercepat rehabilitasi rumah. Hal ini sejalan dengan dukungan dana APBD sebagaimana temuan penelitian Wedia Rahmah dan Wahyu Subadi, yang memperkuat fondasi pendanaan terstruktur dan terkoordinasi. Mengenai kecukupan, kualitas bahan bangunan dan fasilitas dasar rumah hasil rehabilitasi sudah memenuhi standar layak huni. Namun, terdapat kendala pada sarana dan prasarana pendukung administrasi dan operasional yang masih terbatas, sehingga perlu peningkatan agar proses pelaporan

dan evaluasi dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir. Kehadiran Rencana Kerja dan Target Lokasi (RKTL) sebagai instrumen evaluasi sistematis menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas hasil program secara berkelanjutan. Hal ini relevan dengan temuan penelitian di Kabupaten Tuban yang menyoroti perlunya dukungan sumber daya dan koordinasi agar program berjalan efektif dan konsisten. Faktor penghambat utama pelaksanaan program adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti alat tulis, fasilitas operasional, serta ketidakberlanjutan sumber pendanaan terutama setelah tahun 2025 yang menyebabkan tertundanya kegiatan rehabilitasi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pemerintah daerah untuk mencari sumber dana yang lebih stabil dan peningkatan fasilitas pendukung agar program dapat dilaksanakan secara konsisten dan efisien. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Tuban, yang mengakui kendala serupa terkait keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana prasarana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah:

1. Penambahan dan peningkatan sarana operasional seperti alat tulis kantor, printer, dan kendaraan lapangan sangat diperlukan agar proses administrasi dan pelaporan program berjalan lancar dan efisien. Pendanaan khusus untuk kebutuhan pendukung administrasi dan operasional harus dialokasikan agar pengelolaan program lebih terorganisir dan tidak memberatkan petugas di lapangan.

2. Sosialisasi program harus terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, memahami kriteria, prosedur, dan manfaat program. Pendekatan tatap muka dan keterlibatan aktif aparat kelurahan serta tokoh masyarakat terbukti efektif dan harus diperkuat. Pendampingan administrasi agar masyarakat dapat melengkapi persyaratan seperti kepemilikan sertifikat tanah juga harus diberikan perhatian khusus.
3. Perlu dilakukan peningkatan pengelolaan data penerima bantuan dengan sistem yang lebih terintegrasi dan mutakhir guna menghindari ketidaktepatan sasaran. Evaluasi dan seleksi data secara berkala harus dijalankan untuk memastikan bantuan tepat pada sasaran serta mengantisipasi persoalan administratif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Kurniawan Vadreas, Rifa Turaina, and Septa Ardiansyah, "SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PENENTUAN (SPK) BANTUAN DANA PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DENGAN METODE MULTI FACTOR EVOLUATION PROCESS (MFEP)", *JTIF*, vol. 6, no. 1, pp. 18–23, Apr. 2018.
- Amaliyah, R. (2020). Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Global & Policy*, 8(2), 159-172.
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Kab. Sukabumi: CV Jejak.
- Bovaird, T. dan E. Loffler (ed). (2005). Public Management and Governance.
- Christiyani, B. R., Sulistiyani, S., & Budiyo, B. (2019). Analisis Kondisi Rumah Berdasarkan Tingkat Pemahaman Rumah Sehat di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(3), 31-37.
- Elia, A., & Dkk. (2023). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
- Fitri, U. A., & Kusuma, R. P. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kaitannya Berdasarkan Kerangka SDGs Poin 11. *Balcony*, 1(1), 77–89. Retrieved from <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/balcony/article/view/202>
- Farida, Ida. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 7. No.1.
- Harbani Pasolong. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Hariyono, Paulus. 2010. Perencanaan Pembangunan Kota Dan Perubahan Paradigma. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Iskandar, A. (2020). SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jusuf Leiwakabessy, Putri Indah Cahyani, & Sherly Lewerissa. (2023). Sosialisasi Pengenalan Persyaratan Rumah Yang Aman dan Layak Huni Menurut

- SDGs (Sustainable Development Goals) . *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 26–32. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i4.753>
- Mardhanie, B. A. (2018). Penelitian Rumah Tidak layak Huni (RTLH) Kabupaten Bulungan Tahun 2017: (Jumlah dan Prioritas Penanganan). *Jurnal Kreatif: Desain Produk Industri dan Arsitektur*. Vol. 5. No.2.
- MURYADI, A. D. (2017). *MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI. JURNAL ILMIAH PENJAS* (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran), 3(1).
- Nalatissifa, H., & Ramdhani, Y. (2020). Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 19(2), 246-256.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Nur, N. Y., & Siahaan, A. Y. S. (2022). Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Di Kelurahan Sunggal Kota Medan. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 405–414.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018
- Peraturan Walikota Solok No. 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni
- Pratama, N. B., Purnomo, E. P., & Agustiyara, A. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 64–74. <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8045>
- Rutledge.London. Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik* , Intermedia Jakarta.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.
- Suratman, S.IP., M.Si (2023). *Buku Ajar : Kebijakan Publik*. CV Adanu Abimata.

- Suhaeni, H. (2010). Tipologi Kawasan Perumahan dengan Kepadatan Penduduk Tinggi dan Penanganannya. *Jurnal Permukiman*, 5(3), 116–123. <https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.116-123>
- Sakdiah, Chalimatus (2020) *Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Das Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs)*
- Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. (2019). Dinamic Governance Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Serang. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suaib, E. Teori dan Praktik Kebijakan Publik. wawasan Ilmu.
- Surya, R. Z. (2018). Pemetaan Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Pada Rencana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 4(1).
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 44(1), 1-21.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Wajdi, F. (2022). Hukum dan Kebijakan publik. Sinar Grafika.